NASIONALISME dan PATRIOTISME

DISUSUN UNTUK MEMENUHI SALAH SATU

SYARAT DAN TUGAS MATA KULIAH PANCASILA

STMIK AMIKOM

YOGYAKARTA

DISUSUN OLEH:

NAMA : Bhramito Mahambara

NIM : 11.12.5441

KELAS : 11 SI 02

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga atas karunia-Nya, penulis dapat menyususn makalah ini dalam rangka memenuhi Tugas Akhir Pancasila STMIK AMIKOM YOGYAKARTA

Penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membentu hingga terselesainya karya tulis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyususnan Makalah ini masih banyak kekurangan. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis tunggu demi kesempurnaan karya tulis ini.

Kemudian penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, Oktober 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB 1 NASIONALISME	1
• Pengertian Nasionalisme	1
• Beberapa Bentuk Nasionalisme	2
• Nasionalisme di Indonesia	3
• Kasus-kasus yang Berkaitan dengan Nasionalisme Indonesia	9
BAB II Patriotisme	11
• Pengertian Patriotisme	11
• Indonesia dan Patriotisme Konstruktif	13
• Contoh Patriotisme	14
BAB III Penutup	
• Kesimpulan	16
• Saran	16
DAFTAR PUSTAKA	17

BAB I
NASIONALISME

1. Pengertian Nasionalisme

Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris "nation") dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia.

Para nasionalis menganggap negara adalah berdasarkan beberapa "kebenaran politik" (political legitimacy). Bersumber dari teori romantisme yaitu "identitas budaya" debat liberalisme yang menganggap kebenaran politik adalah sumber dari kehendak rakyat, atau gabungan kedua teori itu.

Para ilmuwan politik biasanya menumpukan penyelidikan mereka kepada nasionalisme yang ekstrem seperti nasional sosialisme, pengasingan, dan sebagainya.

Nasionalisme adalah suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan Negara atas kesadaran keanggotaan / warga Negara yang secara potensial bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabdikan identitas, intergritas kemakmuran dan kekuatan bangsanya. Nasionalisme di bagi menjadi dua artian, yakni :

Nasionalisme dalam arti sempit

Nasionalisme dalam arti sempit sering disebut dengan *jingoisme* atau *chauvinisme*

Nasionalisme dalam arti luas

Nasionalisme dalam pengertian luas ini dapat diartikan sebagai perasaan cinta dan bangga terhadap tanah air dan bangsanya tanpa memandang bangsa lain lebih rendah dari bangsa dan negaranya.

2. Beberapa Bentuk Nasionalisme

Nasionalisme dapat menonjolkan dirinya sebagai sebagian paham negara atau gerakan (bukan Negara) yang populer berdasarkan pendapat warga negara, etnis, budaya, keagamaan dan ideology. Kategori tersebut lazimnya berkaitan dan kebanyakan teori nasionalisme mencampuradukkan sebahagian atau semua elemen tersebut.

Nasionalisme kewarganegaraan (atau nasionalisme sipil) adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya, "kehendak rakyat", "perwakilan politik". Teori ini mula-mula dibangun oleh Jean-jacques rousseau dan menjadi bahan-bahan tulisan. Antara tulisan yang terkenal adalah buku berjudul Du Contact Sociale (atau dalam Bahasa Indonesia "mengenai kontrak sosial").

Nasionalisme Etnis adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Dibangun oleh Johan Gottfried von Herder, yang memperkenalkan konsep Volk (bahasa Jerman untuk "rakyat"). Kepada perwujudan budaya etnis yang menepati idealisme romantik kisah tradisi yang telah direka untuk konsep nasionalisme romantik. Misalnya "Grimm Bersaudara" yang dinukilkan oleh Herder merupakan koleksi kisah-kisah yang berkaitan dengan etnis Jerman.

Nasionalisme Budaya adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan bukannya "sifat keturunan" seperti warna kulit, ras, dan sebagainya.

Nasionalisme kenegaraan ialah variasi nasionalisme kewarganegaraan, selalu digabungkan dengan nasionalisme etnis. Perasaan

nasionalistik adalah kuat sehingga diberi lebih keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Kejayaan suatu negeri itu selalu kontras dan berkonflik dengan prinsip masyarakat demokrasi. Penyelenggaraan sebuah ’national state’ adalah suatu argumen yang ulung, seolah-olah membentuk kerajaan yang lebih baik dengan tersendiri. Contoh biasa adalah Nazisme, serta nasionalime Turki kontemporer, dan dalam bentuk yang lebih kecil, Fransquisme sayap kanan di Spanyol, serta sikap ’ Jacobin ’ terhadap unitaris dan golongan pemusat negeri Prancis, seperti juga nasionalisme masyarakat Belgia, yang secara ganas menentang demi mewujudkan hak kesetaraann (equal rights) dan lebih otonomi untuk golongan Fleming, dan nasionalis Basque atau Korsika.

Nasionalisme agama ialah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama.

Nasionalisme merupakan sebuah penemuan sosial yang paling menakjubkan dalam perjalanan sejarah manusia, paling tidak dalam seratus tahun terakhir. Tak ada satu pun ruang sosial di muka bumi yang lepas dari pengaruh ideologi ini. Tanpa nasionalisme, lajur sejarah manusia akan berbeda sama sekali. Berakhirnya perang dingin dan semakin merebaknya gagasan dan budaya globalisme (internasionalisme) pada dekade 1990-an hingga sekarang, khususnya dengan adanya teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang dengan sangat akseleratif, tidak dengan serta-merta membawa lagu kematian bagi nasionalisme.

Kaca mata etnonasionalisme ini berangkat dari asumsi bahwa fenomena nasionalisme telah eksis sejak manusia mengenal konsep kekerabatan biologis. Dalam sudut pandang ini, nasionalisme dilihat sebagai konsep yang alamiah berakar pada setiap kelompok masyarakat masa lampau yang disebut sebagai ethnie (Anthony Smith, 1986), suatu kelompok sosial yang diikat oleh atribut kultural meliputi memori kolektif, nilai, mitos, dan simbolisme.

3. Nasionalisme di Indonesia

Nasionalisme Indonesia pada awalnya muncul sebagai jawaban atas kolonialisme. Pengalaman penderitaan bersama sebagai kaum terjajah melahirkan semangat solidaritas sebagai satu komunitas yang mesti bangkit dan hidup menjadi bangsa merdeka. Semangat tersebut oleh para pejuang kemerdekaan dihidupi tidak hanya dalam batas waktu tertentu, tetapi terus-menerus hingga kini dan masa mendatang.

Kebijakan pendidikan nasional di awal abad XX telah menciptakan inti dari elite baru Indonesia yang terdiri dari para dokter, guru, dan pegawai sipil pemerintah. Bersamaan dengan itu, kebencian yang laten terhadap dominasi kolonial timbul di atas ambang kesadaran nasional. Berdirinya Boedi Oetomo (1908) menjadi tanda kebangkitan nasionalisme Indonesia yang kemudian diikuti organisasi-organisasi nasional lainnya.

Jiwa nasionalisme kaum elite dari hari ke hari semakin meluas dan menguat di hati rakyat. Tekanan ekonomi yang teramat berat selama pendudukan Jepang memperkuat semangat nasionalisme untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Pada kurun waktu 1945-1950, jiwa nasionalisme diperteguh oleh semangat mempertahankan kemerdekaan, serta persatuan dan kesatuan Indonesia yang dirongrong oleh perlawanan kedaerahan dari negara-negara boneka bentukan Belanda.

Kini nasionalisme menghadapi tantangan besar dari pusaran peradaban baru bernama globalisasi. Nasionalisme sebagai basic drive serta elan vital dari sebuah bangsa bernama Indonesia sedang diuji fleksibilitasnya, dalam arti kemampuan untuk berubah sehingga selalu akurat dalam menjawab tantangan zaman. Fleksibilitas tidaklah mengurangi jiwa nasionalisme, justru sebaliknya, fleksibilitas menunjukkan begitu dalamnya nasionalisme mengakar sehingga dalam waktu bersamaan dia tetap hidup dan terus-menerus bermetamorfosis.

Pusaran ekonomi global menendang nasionalisme jauh ke pinggiran. Nasionalisme menjadi tidak relevan lagi. Di masa lalu modal terkait erat dengan rakyat. Dia memiliki tanggung jawab sosial untuk

menghidupi seluruh anggota komunitas (bangsa). Namun kini, privatisasi terus-menerus menyeret modal menjauh dari dimensi sosial atau komunitasnya. Demi keuntungan yang sebesar-besarnya modal dengan cepat berlari (capital flight) ke (negara) mana pun yang disukainya.

Globalisasi sebagai proses de-teritorialisasi tidak hanya menimbulkan persoalan di bidang ekonomi, tetapi juga kebudayaan. Kebudayaan kerap dikaitkan dengan teritori tertentu. Ruang membentuk identitas budaya. Ini berarti nasionalisme Indonesia pun dibangun oleh kebudayaan Indonesia yang berada dalam batas-batas geografis tertentu. Itu pemahaman kebudayaan di masa lalu.

Globalisasi sebagai proses de-teritorialisasi telah mengubah semua itu. Kebudayaan tidak lagi terkungkung dalam teritori tertentu. Kini tidak sedikit anak-anak muda Kota Kembang yang lebih terampil break dance daripada jaipongan; atau lebih mahir bermain band, daripada menabuh gamelan. Kita juga bisa menyaksikan orang barat yang menjadi dalang dan piawai memetik kecapi. Kita bisa menyaksikan ibu-ibu yang setia berkebaya serta bapak-bapak yang bersarung atau berpeci, pada waktu bersamaan begitu menikmati fast food bermerek global. Kebudayaan telah melepaskan diri dari keterikatannya pada nation-state. Kenyataan ini menghadapkan nasionalisme dengan persoalan, manakah kebudayaan yang akan menjadi media berurat-akarnya nasionalisme?

Bersamaan dengan proses de-teritorialisasi dan mengglobalnya kebudayaan terjadi gerak sebaliknya berupa pencarian identitas lokal yang semakin intensif.

Proses mengglobal dan melokal janganlah dipandang sebagai penyakit atau kelainan dalam budaya masyarakat tetapi mesti diterima sebagai keutamaan hidup manusia; semakin mengglobal semakin rindu akan identitas lokalnya. Gerak paradoks tersebut tampak jelas dalam bangkit dan menguatnya gerakan-gerakan etnis serta agama. Nation-state menghadapi ancaman dari berbagai gerakan partikular sehingga memicu domestic conflicts yang dapat membawa pada runtuhnya nation-state

seperti yang dialami oleh bekas negara Uni Soviet. Pada titik ini nasionalisme pun dipertanyakan eksistensi dan relevansinya.

Globalisasi bidang politik mendatangkan persoalan serupa atas nasionalisme. Globalisasi telah mereduksi pentingnya lingkup politik dari nation-state yang merupakan basis bagi pembangunan sosial-politik. Peran nation-state menjadi subordinat karena diambilalih oleh lembaga-lembaga ekonomi transnasional. Jika eksistensi nation-state terpinggirkan, halnya sama dengan nasionalisme, nasionalisme menjadi ideologi yang kedaluarsa.

Dari perspektif ekonomi, budaya, dan politik global tampak bahwa nasionalisme menghadapi tantangan yang sangat besar di tengah pusaran globalisasi saat ini. Apakah ini berarti nation-state tidak relevan lagi, yang berarti tidak relevan pula membicarakan nasionalisme? Fakta menunjukkan bahwa hingga saat ini kewarganegaraan modern dengan berbagai hak sosial, politik, dan sipilnya tidaklah melampaui batas-batas nasional. Meski kini berkembang berbagai komunitas transnasional, Uni Eropa misalnya, namun seseorang yang hendak menjadi anggota terlebih dahulu mesti memperoleh kewarganegaraan dari salah satu negara anggotanya. Ini berarti di tengah arus globalisasi, peran nation-state serta nasionalisme tetap relevan dan signifikan.

Nasionalisme sebagai identitas bukanlah "kata benda" yang bentuk dan wujudnya sudah jadi dan final. Nasionalisme merupakan "kata kerja", artinya dia adalah suatu projek yang mesti terus-menerus dikerjakan, dibangun, serta diberi dasar dan makna baru pada setiap kesempatan. Proses kerjanya dijalani lewat public critical rational discourse yang melibatkan seluruh bagian anak negeri sebagai yang sederajat tanpa mengecualikan siapapun.

Di tengah pusaran globalisasi, nasionalisme Indonesia bukan lagi memanggul senjata atau bambu runcing dengan semangat "merdeka atau mati". Nasionalisme Indonesia bukanlah patriotisme gaya Hitler atau Mussolini, juga melampaui semboyan termashur dari Perdana Menteri

Britania Raya, Disraeli, "benar atau salah, negeriku selalu benar". Nasionalisme demikian oleh Mangunwijaya dimaknai sebagai nasionalisme pasca-Indonesia.

Arah nasionalisme pasca-Indonesia, menurut Mangunwijaya, akan berkembang dengan mengambil sumber dari semangat dasar nasionalisme generasi 1928; suatu nasionalisme yang berpedoman "right or wrong is right or wrong" bukan "right or wrong is my country". Hakikat nasionalisme Generasi 1928 merupakan perjuangan dan pembelaan kawanan manusia yang terbelenggu penjajahan, tertindas, miskin kemerdekaan dan hak menentukan diri sendiri.

Nasionalisme pasca-Indonesia seperti juga nasionalisme 1928 diarahkan untuk memperjuangkan hidup manusia yang termarginalisasi, teralienasi serta tak berdaya menghadapi penguasa ekonomi, politik, budaya yang lalim dan sewenang-wenang.

Bedanya, nasionalisme generasi 1928 ditujukan ke arah lawan asing dari luar, sedangkan bagi nasionalisme pasca-Indonesia yang hidup dalam pusaran globalisasi, batas-batas geopolitis semakin kabur. Perjuangan kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan dari nasionalisme pasca-Indonesia tidak hanya diarahkan ke pihak-pihak asing tetapi juga ke dalam negeri sendiri, bahkan diri sendiri. Nasionalisme pasca-Indonesia merupakan perjuangan untuk meniadakan segala bentuk eksploitasi manusia (juga lingkungan hidup beserta semua penghuninya) oleh siapa pun, dari manapun dan dalam bentuk apa pun.

Nasionalisme pasca-Indonesia tidak menghabiskan "hidupnya" untuk memaksakan memilih salah satu pro atau kontra globalisasi. Bagi nasionalisme pasca-Indonesia, globalisasi merupakan proses sejarah yang tak terelakan (unevitable). Kita tidak mungkin lari apalagi menolak serta menghentikan proses globalisasi. Nasionalisme pasca-Indonesia lebih concern dengan persoalan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana "mengawal" globalisasi supaya semakin manusiawi.

Nasionalisme Indonesia Era Reformasi kaitanya dengan Globalisasi.

Pada masa sekarang ini satu hal yang perlu dibenahi oleh bangsa Indonesia adalah mentalitas warga masyarakatnya. Sikap mental yang kuat dan konsisten serta mampu mengeksplorasi diri adalah salah satu bentuk konkrit yang dibutuhkan bangsa Indonesia pada saat ini. Saat ini memang bangsa Indonesia sedang mengalami massa-masa keterpurukanya dalam dunia intetrnasional. Krisis multidimensi yang di barengi dengan krisis ekonomi yang berkepanjanganlah yang menyebabkan kegoncangan dan keterpurukan mental Indonesia.

Bangsa Indonesia yang pada masa dahulu terkenal dengan kebudayaan yang begitu eksklusif dan memukau serta penduduk yang ramah-tamah di dukung juga oleh kondisi geografis yang sangat strategis dan dikaruniai tanah yang subur, sekarang justru berubah 180 drajat. Hal ini tidak lepas dari mentalitas warga pendukung yang sangat lemah. Tak ada lagi terlukiskan semangat-semangat nasionalisme dalam diri Indonesia. Mereka seakan lupa akan perjuangan para pahlawan-pahlawan bangsa yang telah mengorbankan tidak hanya harta bendanya tetapi mereka juga mengorbankan nyawa dan keluarga mereka. Sungguh besar jassa mereka, sungguh tinggi jiwa nasionalisme mereka, dan sungguh jauh jika dibandingkan dengan bangsa Indonesia pada masa sekarang ini.

Tidak ada lagi jiwa nasionalis yang dapat ditunjukan kita, kita seakan malah menganggap remeh mereka para pejuang yang telah berjasa kepada kita. Hal ini dapat kita buktikan bahwa pemerintah tetrkesan kurang memperhatikan nasib para veteran.

Kita seakan tenggelam, dalam gemerlapnya harta. Globalisasi dan kapitalisme mengubah mentalitas kita menjadi sangat jauh dengan mental nasional kita. Banyak diantara kita yang rela menjual tanah airnya, hanya karena sedikit kemewahan dari negeri orang. Mereka justru membangga-banggakan negeri orang lain disbanding negerinya sendiri. Sebagai contoh yang dapat menunjukan hal seperti ini adalah penduduk Indonesia pada saat ini justru lebih senang menggunakan produk luar dari pada memakai produk buatan sendiri. Memang produk luar secara kualitas lebih menjalin,

bangsa Indonesia belum mampu bersaing untuk menciptakan suatu tekhnologi yang canggih untuk menciptakan produk yang berkualitas. Tapi sikap masyarakat yang lebih mencintai produk luar sangatlah tidak dibenarkan. Mereka tidak memikirkan dampak negatifnya.

Dampak negatifnya antara lain adalah bangsa Indonesia jistru akan lebih tertinggal dengan Negara lain, sebab warga negaranya yang diharapkan dapat mendukung perkembangan tekhnologi di Indonesia malah justru meninggalkanya dan lari kepada Negara lain yang lebih maju. Dalam hal ini bangsa Indonesia terkesan egois, dan secara kasar warganya dapat dikatakan sebagai penghianat bangsa.

4. Kasus-kasus yang Berkaitan dengan Nasionalisme Indonesia

Kasus Sipadan dan Ligitan

Sipadan ligitan merupakan salah satu pulau Indonesia yang masuk dalam zona rawan intervensi. Wlaupun pulau ini bukanlah pulau yang luas, sipadan ligitan, kerapkali menimbulkan intervensi dan pengklaiman sepeihak terhadap kepemilikian pulau tersebut. Hal ini dikatenakan masih sangat lemahnya sistem hukum, dan pertahanan dan keamanan Negara.

Pada kekade 2000 lalu, sipadan ligitan kembali mengundang polomik terhadap Negara lain. Kali ini adalah negeri jiran Malaysia yang mengklaim, atas kepemilikan dua pulau tersebut. Merekan mengeluarkan sebuah pernyataan yang sangat menyakitkan bangsa Indonesia. Kepemilikan Indonesia atas sipadan ligitan tidak diakui malahan merekan mengakui bahwa merekalah yang berhak atas kepemilikan sipadan dan ligitan.

Kasus Pulau Ambalat

Tak beda juga dengan ambalat, sebuah pulau yang masuk dalam zona kritis intervensi. Kali ini juga Indonesia dan Malaysia kini menghadapi persoalan wilayah Ambalat akibat pemberian konsesi untuk

ekplorasi minyak oleh perusahaan minyak Malaysia (Petronas) pada 16 Februari 2005 kepada perusahaan Shell asal Inggris/Belanda di Laut Sulawesi yang berada di sebelah timur Pulau Kalimantan. Indonesia menyebut wilayah yang diklaim Malaysia itu blok Ambalat dan blok East Ambalat. Di blok Ambalat, Indonesia telah memberikan konsesi kepada ENI (Italia) pada tahun 1999 dan sekarang dalam tahap eksplorasi. Sedangkan blok East Ambalat diberikan kepada Unocal (AS) pada tahun 2004.

Untuk blok East Ambalat, kontrak baru ditandangani 13 Desember 2004. Namun kontrak ini menjadi bermasalah ketika Malaysia mengklaim masalah tersebut sebagai wilayahnya dan menolak klaim Indonesia. Malaysia mengklaim Ambalat wilayahnya dengan pertimbangan berada dalam teritorial Malaysia sebagai implikasi lepasnya Sipadan-Ligitan yang tentu berdampak kepada luas batas perairannya. Parahnya, kedua negara belum menuntaskan garis batas teritorial laut.

Perdana menteri Abdullah Ahmad Badawi dengan tegas mengklaim wilayah East Ambalat adalah wilayahnya, sebaliknya dan patut diherankan adalah pernyataan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono yang tidak menganggap sikap Malaysia tersebut sebagai ancaman. Pernyataan tersebut tentu mempunyai banyak interpretasi.

Sebagai salah satu bentuk sikap politik yang bersahabat dan etis mungkin hal itu dapat dibenarkan, namun dalam kondisi keterpurukan Indonesia seperti sekarang, ketegasan sangat diperlukan untuk mengatakan sikap Malaysia tersebut dapat menjadi ancaman bagi Indonesia. Belajar dari pengalaman Sipadan-Ligitan, sikap Indonesia yang kurang tegas dan tanggap menghasilkan lepasnya kedua pulau tersebut dari pangkuan Indonesia. Tentu Indonesia tidak rela Ambalat jatuh ke tangan Malaysia, karena bukan tidak mungkin akan menyusul penguasaan wilayah Indonesia oleh negara tetangga terhadap pulau-pulau kecil dan wilayah perairannya yang diperkirakan mencapai 92 buah pulau kecil perbatasan. Jika Ambalat lepas dari Indonesia, hal itu semakin membuktikan

kedaulatan negara terancam dan harga diri serta martabat bangsa rendah di mata dunia.

BAB II
PATRIOTISME

1. Pengertian Patriotisme

Patriotisme adalah sikap yang berani, pantang menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Patriotisme berasal dari kata **"patriot"** dan **"isme"** yang berarti sifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan, atau "heroism" dan "patriotism" dalam bahasa Inggris. Pengorbanan ini dapat berupa pengorbanan harta benda maupun jiwa raga.

Patriotisme adalah semangat dan jiwa yang dimiliki oleh seseorang untuk berkorban / rela berkorban demi nusa bangsa atau Negara.

Beberapa tokoh seperti Blank (2003) & Schmidt (2003) melalui studi mereka mendukung pendapat bahwa patriotisme tidak sama dengan nasionalisme. Nasionalisme lebih bernuansa dominasi, superioritas atas kelompok bangsa lain. Tingkat nasionalisme suatu kelompok atau bangsa, ditekankan pada adanya perasaan "lebih" atas bangsa lain .

Dibandingkan dengan nasionalisme, patriotisme lebih berbicara akan cinta dan loyalitas. Patriotisme memiliki beberapa dimensi dengan berbagai istilah, namun Staub (1997) membagi patriotisme dalam dua bagian yakni blind dan constructive patriotism (patriotisme buta dan patriotisme konstruktif). Sementara Bar-Tal (1997) menyisipkan conventional patriotism diantaranya.

Staub menyatakan patriotisme sebagai sebuah keterikatan (attachment) seseorang pada kelompoknya (suku, bangsa, partai politik, dan sebagainya). Keterikatan ini meliputi kerelaan seseorang dalam mengidentifikasikan dirinya pada suatu kelompok sosial (attachment) untuk selanjutnya menjadi loyal.

Dari rentetan sejarah pemahaman patriotisme, nampaknya patriotisme yang kemudian populer dan dikenal masyarakat luas, tidak

hanya di Indonesia, namun juga di dunia ialah blind patriotism. Hal ini mendorong Staub juga Bar-tal menghimbau dalam bukunya, "Patriotism-in the lives of individuals and nations", untuk mempopulerkan dimensi patriotisme yang semestinya lebih merasuk yaitu constructive patriotism.

Patriotisme buta didefinisikan sebagai sebuah kerikatan kepada negara dengan ciri khas tidak mempertanyakan segala sesuatu, loyal dan tidak toleran terhadap kritik. *"Blind patriotism is defined as an attachment to country characterized by unquestioning positif evaluation, staunch allegiance, and intolerance of critism*".(Staub: 1997).

Melihat definisi tersebut, dimana patriotisme buta dengan ciri khas menuntut tidak adanya evaluasi positif dan tidak toleran terhadap kritik, mungkin akan lebih mudah dipahami jika kita ingat akan pernyataan yang pernah sangat populer: "Right or wrong is my country!". Pernyataan ini tanpa perlu dipertanyakan lagi memberikan implikasi bahwa apapun yang dilakukan kelompok (bangsa) saya, haruslah didukung sepenuhnya, terlepas dari benar atau salah. Hal ini telah disadari Bar-Tal sebagai pemicu awal totaliterisme atau chauvinisme. Sementara sejarah telah mencatat konsekuensi buruk yang dihasilkan, sebut saja Nazi-Jerman, Mussolini-Itali. Pembantaian orang tak berdosa namun berseberangan dengan pandangan politik pemimpin menjadi legal atas nama patriotisme, nasionalisme pun ikut diseret di dalamnya sehingga bangsa lain pun bisa menjadi sasaran.

Staub juga menyatakan bahwa blind patriotism tidak saja berakibat buruk bagi kelompok luar (outgroup), namun juga membahayakan kelompoknya sendiri (ingroup). Tidak adanya kritik maupun evaluasi sama saja dengan membiarkan kelompok berjalan tanpa peta, hingga bisa terpeleset dan masuk jurang.

Patriotisme konstruktif didefinisikan sebagai sebuah keterikatan kepada bangsa dan negara dengan ciri khas mendukung adanya kritik dan pertanyaan dari anggotanya terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan / terjadi sehingga diperoleh suatu perubahan positif guna mencapai

kesejahteraan bersama. "Constructive patriotism is defined as an attachment to country characterized by support for questioning and critism of current group practices that are intended to result in positive change." (Schatz, Staub, Lavine,1999). Sementara patriotisme konstruktif juga tetap menuntut kesetiaan dan kecintaan anggota (rakyat) kelompoknya (bangsa), namun tidak meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pandangan ini, pemimpin tidak selamanya benar, bahkan sebutan orang tidak patriotis oleh seorang pemimpin bisa jadi berarti sebaliknya. Kritik dan evaluasi terhadap kelompok yang dicintai seseorang justru merupakan bentuk kesetiaannya. Kritik dan evaluasi ini bertujuan untuk menjaga agar kelompoknya tetap pada jalur yang benar atau positif.

Selain hal di atas, dalam patriotisme konstruktif terdapat 2 (dua) faktor penting yaitu mencintai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Seorang yang layak disebut patriot adalah orang yang menjunjung dan mencintai kelompok baik itu kelompok partai atau bangsa atau negara, namun lebih dari itu ia juga harus menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Disinilah diperlukan sikap peduli yang muncul dalam kritik dan evaluasi.

2. Indonesia dan Patriotisme Konstruktif

Indonesia telah mulai belajar menerima dan memahami perbedaan sesungguhnya dengan lebih terbuka. Patriotisme konstruktif juga membutuhkan keterlibatan politik dalam arti luas. Tidak berarti harus tergabung dalam politik praktis, melainkan adanya aktivitas untuk mendapatkan informasi politik atau hal-hal yang berkaitan dengan kelompoknya. Dengan lebih mengenal kelompoknya baik karakteristik maupun permasalahannya, akan memudahkan seseorang untuk bisa lebih pedulli atau terlibat, termasuk mengkritisi untuk menghasilkan perubahan positif.

Terkait dengan pelaksanaan pemilu 2004 yang semakin dekat, penulis melihat dalam suasana kampanye mendatang, akan sangat

memungkinkan munculnya outgroup derogation terhadap kelompok lain, terbukti pada waktu lalu di Bali dengan adanya bentrokan antara 2 (dua) massa pendukung partai. Bentrokan antar massa pendukung inilah yang harus diwaspadai oleh para pucuk pimpinan partai. Kecintaan pada kelompok (ingroup favoritism) hendaklah tidak disertai dengan penilaian negatif terhadap kelompok lain (outgroup derogation). Dengan demikian masing-masing pihak akan terhindar dari patriotisme buta yang bisa berakibat fatal bagi semua pihak.

Menghadapi permasalahan ini, nilai-nilai kemanusiaan yang disodorkan Staub dalam patriotisme konstruktif kemudian menjadi alternatif yang harus dipertimbangkan. Diatas semua kepentingan kelompok, ada kepentingan lain yang lebih besar dan mendasar, yakni terpelihara serta dijunjung tingginya nilai-nilai kemanusiaan dalam berkompetisi. Sehebat apapun kelompok partai yang didukung, haruslah diingat dan dihayati betul besarnya nilai-nilai kemanusiaan. Jika ini ditanamkan pada setiap pribadi terutama dalam konteks ini adalah tiap partai politik, maka pemilu 2004 dan pemilu selanjutnya akan menjadi pesta demokrasi yang akan selalu dinantikan rakyat Indonesia.

3. Contoh Patriotisme

Contoh patriotisme dalam lingkungan keluarga dan masyarakat misalnya, memberi hewan kurban di Hari Raya idul Adha, membayar pajak tepat waktu, membantu peningkatan taraf hidup warga dikampungnya.

Contoh patriotisme di sekolah misalnya, melakukan sumbangan uang untuk membantu teman sekelasnya yang terkena musibah, membersihkan lingkungan sekolah, menjalin persahabatan dengan sekolah lain atau tidak melakukan tawuran pelajar.

Contoh patriotisme di lingkungan instansi pemerintah dan swasta misalnya, memprakarsai kegiatan donor darah, pengentasan kemiskinan, membantu korban bencana alam atau berperilaku adil dan bijaksana.

Rangkaian kegiatan yang merupakan bagian dari pewarisan antara lain adalah suka bekerja keras, ulet, tekun, membiasakan menabung, berperilaku hemat atau sederhana. Kegiatan-kegiatan diatas diharapkan nilai-nilai di balik kegiatan tersebut akan mebentuk kepribadian diri. Misalnya, tapak tilas, kunjungan ke museum, melaksanakan upacara bendera, disiplin diri atau berjiwa kreatif.

Pembelaan Negara diantaranya wajib militer (wamil), pendidikan bela Negara atau kewiraan sebagai pendidikan wajib atau kewajiban penggunaan barang-barang dalam negeri dan tidak mengimpor barang-barang dari luar negeri.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Nasionalisme adalah paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia.

Nasionalisme merupakan rasa cinta terhadap tanah air dan gambaran semangat juang bangsa dalam mempertahankan hak-hak bangsanya sebagai bangsa yang berdaulat.

Patriotisme adalah semangat dan jiwa yang dimiliki oleh seseorang untuk berkorban / rela berkorban demi nusa bangsa atau Negara.

Patriotisme tidak sama dengan nasionalisme. Nasionalisme lebih bernuansa dominasi, superioritas atas kelompok bangsa lain. Tingkat nasionalisme suatu kelompok atau bangsa, ditekankan pada adanya perasaan "lebih" atas bangsa lain.

Dibandingkan dengan nasionalisme, patriotisme lebih berbicara akan cinta dan loyalitas.

B. Saran

Semoga kecintaan anak bangsa terhadap Indonesia atau kelompok sosial lainnya bukanlah "cinta buta", sehingga bangsa ini meski perlahan namun pasti bisa beranjak bangkit dan menegakkan kepala di tengah dunia internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Pitaloka RR. Ardiningtiyas, M.Psi. 2004. ***Patriotisme & Nilai Kemanusiaan***: Jakarta.
http://id.wikipedia.org/wiki/Nasionalisme
http://id.wikipedia.org/wiki/Patriotisme

Pemberantasan Korupsi

DISUSUN UNTUK MEMENUHI SALAH SATU
SYARAT DAN TUGAS MATA KULIAH PANCASILA
STMIK AMIKOM
YOGYAKARTA

DISUSUN OLEH:

NAMA : Bhramito Mahambara
NIM : 11.12.5441
KELAS : 11 SI 02

Di Indonesia praktek korupsi sudah semakin meluas dan bahkan sudah sampai disegala aspek kehidupan, baik itu ditingkat seluruh kelembagaan di pusat maupun di daerah, korupsi bak seperti pelaku kecanduan narkoba yang sulit diberantas karena sudah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi setiap saat dan serta manjadi jalan hidup oleh koruptor untuk memperoleh harta kekayaan sebanyak-banyaknya *(way of life)*, tanpa mempedulikan lagi yang namanya hukum serta azas kemanusiaan. Perilaku korupsi di Indonesia dalam sejarahnya sudah menjadi kebiasaan (budaya) yang sulit untuk diberantas, karena banyaknya permasalahan-permasalahan diberbagai aspek yang mendukung terjadinya korupsi itu sendiri. Kompleksitas korupsi ini seolah-olah tidak menjadi permasalahan prioritas yang harus diselesaikan secara bersama-sama namun lebih kepada korupsi dijadikan alat bagi penguasa yang mempunyai wewenang dan otoritas untuk memberikan kesempatan serta peluang untuk dirinya sendiri dan kelompoknya (partai) agar korupsi itu ada dibawah tangannya.

Ini bisa dilihat dari berbagai indikator misalnya dimulainya dari Peraturan PerUndang-Undangan itu sendiri yang memberikan kelemahan-kelamahan terjadinya korupsi, itu baru dilihat dari segi peraturannya yang memberikan peluang atau celah serta kesempatan terjadinya korupsi, belum lagi dari simtem yang bobrok yang diperlakukakan oleh lembaga-lembaga negara pada umumnya yang tidak terkontrol dan anehnya orang yang berprilaku baik (sholeh) ketika sudah memasuki sisitem yang bobrok tersebut malah ikut-ikutan masuk ke dalam sistem yang tidak dikehendakinya, jadi orang yang baik, cerdas, profesional, dan mempunyai *track record* yang bagus tidak menjadi jaminan dia bisa terhindar dari kejahatan korupsi.

Korupsi bak seperti lingkaran setan yang sulit untuk keluar karena kerjanya dipengaruhi oleh sistem yang jelek yang dibangun oleh para penguasa yang mempaunyai otoritas dan wewenag. Dan yang tidak kalah pentingnya terjadinya korupsi itu disebabkan oleh penyalahgunaann kekuasaan tanpa adanya akuntabilitas dan transparansi kepada publik sehingga kekuasaan yang mereka miliki digunakan untuk kepentingan pribadi atau sekelompok golongan tanpa mempedulikan nasib kepentingan rakyat yang semestinya mereka perjuangkan sebagai wakil rakyat (DPR) ataupun para pejuang penegak hukum (Kejaksaan Agung, hakim dan Kepolisian), sebagai konsekuensi dari korupsi itu rakyatlah yang menaggung beban akibat dari para pelaku

koruptor, rakyat menjadi miskin, pengangguran bertambah banyak, biaya ekonomi semakin mahal, yang kaya bertambah kaya dan yang miskin bertambah miskin, kesenjangan itu semakin terlihat akibat oleh para koruptor. Tidak salah kalau korupsi itu disebut sebagai kejahatan yang luar biasa *(extra ordinary crime)*, bahkan ia merupakan ancaman terhadap kemanusiaan *(crime again himanity)* dimanakah hati nurani mereka sesungguhnya?

Terjadinya korupsi itu sendiri tidak bisa lepas dari aspek ”hukum dan politik”, ketika hukum benar-banar ditegakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegara ini, maka akan ada secercah harapan agar korupsi ini bisa dibasmi atau setidaknya dikurangi, ketika berbicara hukum tentunya tidak lepas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lemabaga yang berwenang untuk membuat Undang-undang seperti DPR. Jadi sejatinya kedua elemen pokok itu sangat menentukan upaya pemberantasan pelaku korupsi di Indonesia yang sudah semakin merajalela, contohnya adalah ketika Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan untuk mengatasi, menanggulangai dan memberantas korupsi yakni pembentukan lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) merupakan langkah positif yang dilakukan oleh pemerintah dan lemabga DPR sehingga kejahatan korupsi ini kembali ditakuti olek koruptor yang semenjak dekade silam penegakan hukum mengalami krisis.

Upaya ini semestinya kita dukung secara bersama-sama, bukan untuk dibikin isu agar lemabaga ini dibubarkan oleh DPR, kalau isu ini sampai terjadi kita bisa mengukur lembaga DPR bukan lagi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat tetapi Dewan penyengsara rakyat. Tentunya kita masih berharap lembaga negara seperti DPR selalu memperjuangkan aspirasi rakyat, mendengarkan hati nurani, menjadi pengkriktik kebijakan pemerintah yang menyeleweng dan merugikan rakayat, serta menjadi teladan bagi politisi yang belum berkiprah secara nasional, mudah-mudahan ke depannya kesemua ini bisa terwujud. Selain Lemabaga DPR selaku pembetuk Undang-Undang yang disetujui oleh presiden, kita masih berharap kepada para penegak hukum seperti Kejaksaan Agung agar benar-benar menjalankan fungsinya secara penuh komitmen dan tanggung jawab, tertangkapnya Tri Urip Gunawan sebagai pelaku korupsi cukuplah menjadi pelajaran berharga bagi jaksa-jaksa lainnya, jaksa yang diharapkan menyapu bersih korupsi malah tertangkap tangan melakukan korupsi, semoga ini menjadi tolak ukur bagi Ketua

Kejaksaan Agung sudah sampai sejauh mana kinerja anggotanya.

Kemudian persoalan hakim, kita harapakan hakim yang adil akan tumbuh di negara tercinta ini, hakim yang adil hanya akan tumbuh ketika uang bukan segala-galanya tapi lebih kepada pertangung jawaban terhadap negara dan amanah yang mereka kerjakan nantinya akan dipertanggungjawabkan diakhirat kelak. Sebagai bangsa yang beragama seorang hakim harus memikirkan sampai kesana. Parameter hakim yang adilpun tidak bisa ditentukan oleh kualitasnya, jenjang pendidikan, serta lulus secara uji kalayakan tapi lebih kepada hati nuraninya yang takut kepada Tuhan bukan kepada manusia.

Lembaga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) yang harus diselenggarakan di daerah juga harus dipertimbangkan secara matang dan bijaksana, walaupun mengingat dibentuknya pengadilan ini disetiap daerah akan menghabiskan anggaran, tapi persoalan ini harus dipikirkan lagi mengingat korupsi sudah mendarah daging dan sulit sekali untuk diberantas di daerah. Lembaga selanjutnya adalah lembaga kepolisioan, sudah sepatutnya lemabga kepolisian sebagai panutan bagi masyarakat bukan sebagai lembaga yang harus ditakuti keberaaannya dalam penegakan hukum di Indonesia ini. Kita sangat bersyukur ditengah-tengah tidak konsisitennya (inkonsistensi) lembaga-lembaga penegak hukum ini justru KPK hadir sebagai para pejunag penegak kedilan walaupan kinerjanya masih terdapat kekurangan-kekurangan.

Selain dilihat dari prespektif hukum, kita bisa juga melihat dari kaca mata politik, sejatinya politik awalnya bermakna mulia. Bila kita baca kembali buku-buku teori tentang perpolitikan, hampir semua menyatakan bahwa politik bertujuan sebagai sarana memperjuangkan kepentingan rakyat atau umat. Para teoritikus dan filosof politik mulai dari plato hingga Al-Mawardi dan Ibnu Taymiah manyatakan bahwa politik adalah jalan untuk mensejahterakan rakyat. Bahkan analisis politik modren seperti Robert Dahl dan Samuel Hutington berulang kali menjelaskan makna dan peran strategis partai politik untuk menunjang dan menciptakan demokrtasi. Karena itu partai politik yang kuat dan mengakar menjadi mutlak untuk menunjang kedewasaan politik semua bangsa demi mewujudkan cita-cita politik yang mensejahterakan rakyat.

Tentu saja teori politik yang mulia itu tidak selalu berbanding lurus dengan kenyataannya,

faktanya berkata lain, justru politik dijadikan alat untuk memperoleh kekuasaan, yang dijadikan permasalahan ketika alatnya itu disalah gunakan oleh penguasa untuk tidak mensejahterakan raktat. Para penguasa lebih bersifat pragmatis demi kepentingan semata yang diedentikkan dengan uang dan uang. Political wiil yang kita harapakan kepada pemerintah untuk pelaku korupsi malah belum berjalan secara optinmal, yang amat kita sayangkan adalah demokarasi itu justru ternodai oleh kineja partai politik yang fungsinya tidak lagi memberikan pendidikan politik tetapai hanya sebagai jemabatan kekuasan yang digunakan oleh aktor untuk menduduki kursi di parlemen, partai politik tidak gencar memrangi korupsi malah terlibat melakukan tindak kejahatan korupsi, menurut data Global Corruption Barometer (GCB)-TI Indonesia tahun 2007 kemaren partai politik menempati rangking yang ke 4 (empat) sesudah kepolisian, parlemen dan pengadilan.

Sebagai penutup fungsi politik sebagai sarana dan jalan menuju negara yang demokratis harus kita tegakkan secara bersama-sama, jangan politik dijadikan kambing hitam dan menodai demokrasi di indoneseia, tapi politik lebih dilhat sebagai kebijakan, kebijaksanaan pemerinatah, serta kekuasaan yang mesti ada untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan asaz Pancasila dan amanah kontitusi UUD 1945, semoga saja pemberantasan korupsi ini bisa kita wujudkan secara bersama-sama. *Wallahu A'lam Bisshawab*.

Separatisme dan Terorisme

DISUSUN UNTUK MEMENUHI SALAH SATU
SYARAT DAN TUGAS MATA KULIAH PANCASILA
STMIK AMIKOM
YOGYAKARTA

DISUSUN OLEH:

NAMA : Bhramito Mahambara

NIM : 11.12.5441

KELAS : 11 SI 02

Saat ini ada dua bentuk ancaman bagi keamanan dan pertahanan bangsa Indonesia yakni separatisme dan terorisme. Sayangnya, tidak ada kesadaran bersama dalam kepemimpinan nasional untuk menghadapi ancaman ini secara adil. Untuk kasus teroris, kewaspadaan kita tampak begitu tinggi sementara untuk kasus separatis tidak demikian.

Kasus peragaan tarian cakalele yang disertai pengibaran bendera RMS di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi bukti rendahnya kesadaran nasional tentang bahaya keberadaan kelompok separatis. Apabila kesadaran dan persepsi kita tentang ancaman (*threat perception*) tidak segera dibangkitkan kembali, maka kasus-kasus serupa tidak mustahil akan terulang.

Pada dasarnya, baik kelompok separatis maupun teroris dalam operasinya memiliki tujuan yang sama, yaitu merusak legitimasi negara. Bedanya, kelompok separatis mencoba untuk melawan negara dan berupaya melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan mendirikan negara baru versi mereka. Mereka juga memiliki kemampuan untuk mendapatkan simpati dunia serta mampu menjalin hubungan dengan kekuatan internasional.

Tidak demikian dengan kelompok teroris yang dalam operasinya tidak mesti memusuhi negara. Kelompok ini berusaha melawan dominasi global Barat. Karenanya, ancaman teroris tidak hanya berdampak secara lokal tetapi juga global. Namun demikian dua-duanya tidak bisa dipisahkan dari aksi-aksi kekerasan (*violence*) dalam mencapai tujuan-tujuan mereka. Uniknya, sama-sama menjadi musuh negara, tapi perlakuan yang mereka terima berbeda. Mereka yang dituduh teroris diburu di mana-mana, sedangkan untuk separatis karena pertimbangan publik internasional, mereka cenderung diperlakukan dengan sangat hati-hati. Padahal tidak seharusnya seperti itu.

Kasus memalukan yang terjadi di Maluku tanggal 29 Juni 2007 itu merupakan contoh betapa kita sebagai bangsa tidak memiliki persepsi yang sama tentang tingginya tingkat bahaya gerakan separatis RMS. Karenanya bukan pada tempatnya untuk menyalahkan dan mencari kambing hitam dari peristiwa ini. Dari peristiwa tersebut, justru persespi kita tentang ancaman dari kelompok separatis yang juga melakukan aktivitas-aktivitas terorisme yang membayakan keutuhan dan keamanan Republik Indonesia ini perlu dikaji ulang. Sebenarnya, kalau kewaspadaan dan persepsi kita sama dalam memandang dan memprioritaskan penyelesaian separatisme, tentu kejadian yang mencoreng martabat bangsa ini tidak bakal terjadi.

RMS dan konflik Ambon

Kalau kita mau jujur, isu tentang RMS sudah lama berkembang luas di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Bahkan beberapa kalangan umat Islam telah menyuarakan dengan keras bahwa RMS terlibat dalam aksi kekerasan dan pembunuhan di Ambon. Dugaan keterlibatan kelompok separatis yang bermarkas di Belanda dalam konflik berdarah di Ambon pun tidak lagi dapat ditutup-tutupi.

Sayangnya, apabila dalam tragedi Ambon dan Poso pemerintah serta aparat keamanan dengan serta-merta menuding Jemaah Islam (JI) sebagai otak di balik kerusuhan berlatar belakang agama ini, tetapi tidak demikian halnya terhadap RMS. Ini karena JI sendiri dianggap sebagai kelompok

teroris yang tidak hanya membahayakan keamanan Indonesia tetapi juga keamanan regional dan internasional.

Dukungan internasional terhadap pemerintah dalam memerangi terorisme yang ditujukan kepada JI sangat kuat baik dalam hal dana maupun bantuan teknis. Strategi dalam menghadapi terorisme tidak lagi pilih-pilih (*indiscriminate targets*). Tidak hanya pemimpin dan elite-elite JI yang ditangkap tetapi para anggota biasa dan simpatisan pun menjadi target operasi. Dampaknya kemudian operasi yang dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 (Densus) sering mendapatkan sorotan publik. Hanya, karena pemerintah mampu meyakinkan tentang ancaman teroris ini kemudiaan kritik-kritik itu dapat dialihkan.

Berbeda dengan JI, RMS karena tidak adanya dorongan dunia internasional akhirnya mendapatkan perlakuan dan perhatian yang berbeda. Walaupun telah terjadi penangkapan-penangkapan terhadap tokoh-tokoh RMS yang terlibat dalam kekerasan di Ambon tetapi tidak semuanya menjadi target operasi represif aparat keamanan. Hanya mereka yang terlibat langsung dalam kegiatan membayakan keamanan negara itulah yang ditangkap.

Operasi yang dilakukan aparat tidak sampai pada penghancuran organisasi dan para anggota pendukung serta simpatisan. Artinya, aparat keamanan terkesan lebih selektif dalam memilih targetnya (*selective targets*). Para pemimpin yang membahayakan diamankan, sementara organisasi dan aktivitasnya di bawah tanah tetap dibiarkan selama tidak secara terbuka menyerang aset-aset pemerintah dan negara. Padahal baik JI maupun RMS sama-sama diduga memiliki jaringan di luar daerah konflik yang memungkinkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas teror lainnya.

Kewaspadaan nasional

Mencermati kejadian yang memalukan ini, memang sangatlah mudah untuk menyalahkan ketidakpekaan aparat keamanan dan pihak intelijen dalam melihat ancaman dari RMS. Para anggota RMS yang menyamar sebagai penari-penari lokal pun lepas dari perhatian mereka. Namun kalau kita mampu melihat persoalan ini pada tataran yang lebih komprehensif, persoalannya terletak pada kesadaran kita secara kolektif dalam mendefinisikan ancaman.

Ini dapat dilihat dari pengakuan pihak Badan Intelejen Negara (BIN) sendiri yang mengatakan telah memberikan laporan secara lengkap jauh-jauh hari akan kemungkinan terjadinya aksi-aksi dari pihak RMS walaupun pada akhirnya laporan itu tidak mendapatkan respons secara memadai dari pihak yang berwenang. Kelengahan aparat yang terkait inilah kemudian dijadikan alasan penyebab terjadinya peristiwa yang merendahkan martabat bangsa itu. Namun, sebenarnya semua itu bersumber dari tidak adanya persepsi kolektif para pemimpin bangsa kita tentang bahaya RMS.

Hal yang paling utama bagi kita sebagai warga negara Indonesia adalah bagaimana isu yang berkembang saat ini tidak sekadar menjadi wacana politik sesaat. Persoalan Ini harus dijadikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk dapat memperbarui semangat bangsa tentang pentingnya kewaspadaan nasional. Kita ditantang dapat bersama-sama secara sinergis dengan semangat nasionalisme yang kuat untuk terus menjaga keutuhan NKRI dari ancaman kaum separatis.

Namun demikian usaha ini tidak kemudian menutup mata kita untuk melihat persoalan lain bahwa di balik semua itu ada masalah yang perlu diselesaikan yaitu keadilan dan kesejahteraan rakyat. Keadilan dan kesejahteraan harus terus diperjuangkan, dan bersamaan dengan itu kita juga harus tegas dalam menyikapi ancaman tersebut. Para pemimpin nasional dan rakyat Indonesia harus memiliki persepsi yang sama bahwa kaum separatis adalah ancaman besar bagi bangsa Indonesia dan harus dihadapi bersama-sama.

Ikhtisar

- Separatisme dan terorisme sama-sama menjadi ancaman yang sangat serius bagi kedaulatan bangsa Indonesia.
- Saat ini, pemerintah masih sangat hati-hati dalam menghadapi persoalan separatisme, sementara tidak demikian halnya untuk persoalan terorisme.
- Aparat keamanan melakukan pemilihan target saat hendak menangkap kalangan separatis, sedang penangkapan mereka yang diduga terlibat aksi terorisme, dilakukan tanpa memilih target.
- Semestinya pembedaan perlakuan seperti itu tidak boleh terjadi